

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Daerah Kota Jakarta Timur

Wilayah Kota Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam struktur pembangunan Daerah Khusus Jakarta. Sebagai kota administrasi dengan luas wilayah terbesar dibandingkan kota administrasi lain di Jakarta, Jakarta Timur berperan sebagai ruang penyangga utama bagi aktivitas ekonomi, kawasan permukiman, serta mobilitas penduduk lintas wilayah. Peran tersebut tercermin dari tingginya intensitas pergerakan harian masyarakat yang menjadikan Jakarta Timur tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai bagian penting dari sistem pergerakan metropolitan Jakarta.

Karakter wilayah yang didominasi kawasan permukiman dengan kepadatan bervariasi membentuk pola mobilitas yang khas. Sebagian besar perjalanan masyarakat bersifat jarak pendek hingga menengah, terutama dari lingkungan permukiman menuju simpul transportasi utama, pusat kegiatan ekonomi, dan fasilitas pelayanan publik. Pola ini menempatkan Jakarta Timur sebagai wilayah dengan kebutuhan tinggi terhadap sistem transportasi yang mampu menjangkau area lingkungan secara langsung, bukan semata mengandalkan moda transportasi massal berkapasitas besar.

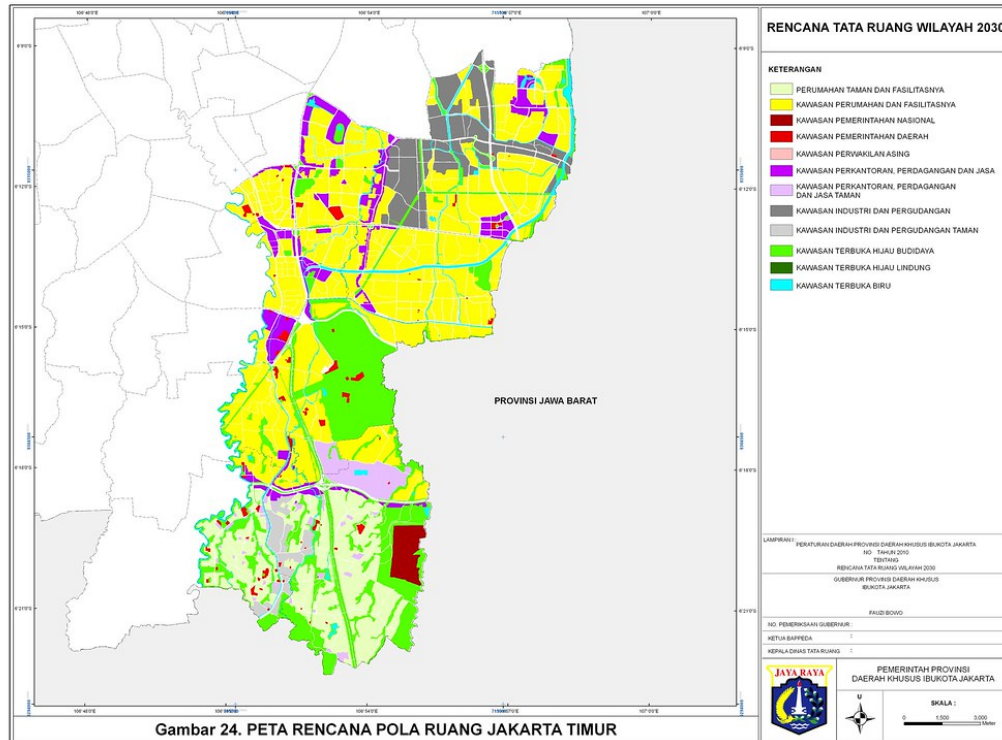
Secara fungsional, Jakarta Timur menjadi simpul pertemuan antara kawasan permukiman padat, pusat kegiatan ekonomi skala menengah, serta jalur perlintasan

utama yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga di sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan pergerakan penduduk di Jakarta Timur bersifat kompleks dan berlapis, melibatkan perjalanan lokal, antarkecamatan, hingga lintas wilayah administrasi. Kompleksitas ini memperkuat kebutuhan akan sistem transportasi publik yang tidak hanya tersedia, tetapi juga terhubung secara fungsional antar moda.

Dalam kerangka tersebut, pengelolaan transportasi publik di Jakarta Timur tidak dapat dilepaskan dari peran layanan angkutan pengumpan sebagai penghubung antara kawasan permukiman dan jaringan transportasi massal utama. Keterbatasan jangkauan moda utama pada beberapa wilayah menjadikan angkutan berskala kecil sebagai elemen penting dalam menjaga keterhubungan sistem transportasi secara menyeluruh. Keberadaan angkutan pengumpan tidak lagi sekadar pelengkap, melainkan bagian strategis dari sistem pelayanan transportasi publik perkotaan.

Kondisi inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan pendekatan integrasi transportasi publik melalui sistem Jak Lingko. Jakarta Timur menjadi salah satu wilayah kunci dalam implementasi kebijakan tersebut karena karakter wilayahnya menuntut layanan transportasi yang mudah diakses, terjangkau, dan terintegrasi. Penguatan peran mikrotrans dalam sistem Jak Lingko diposisikan sebagai upaya menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat Jakarta Timur sekaligus sebagai strategi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan transportasi publik secara keseluruhan.

2.1.1 Kondisi Geografis Daerah Kota Jakarta Timur



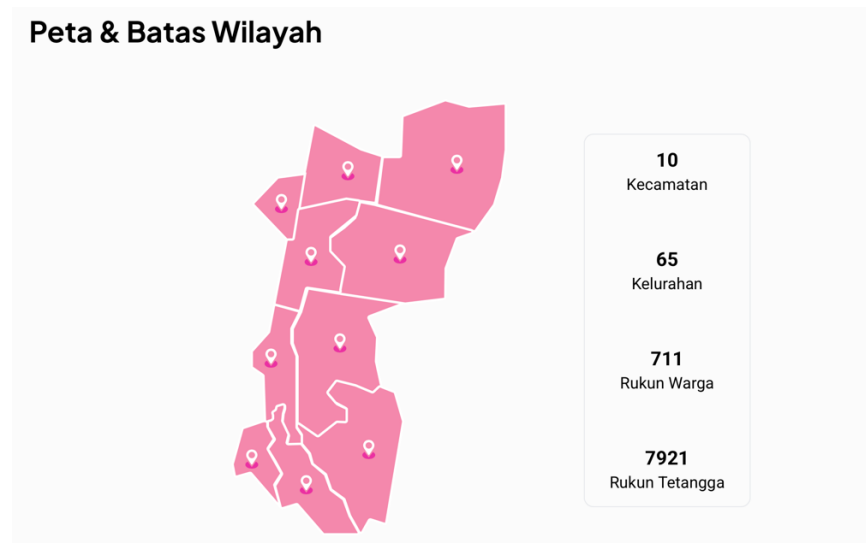
Gambar 2.1 Peta Rencana Pola Ruang Jakarta Timur

(Sumber : Ruang Jakarta's photo 2011)

Kota Administrasi Jakarta Timur merupakan salah satu dari lima wilayah administrasi yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan luas wilayah mencapai sekitar 187,75 km², Jakarta Timur mencakup kurang lebih 28,37 persen dari total luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, sehingga menjadikannya kota administrasi dengan wilayah terluas di antara wilayah administratif lainnya di provinsi tersebutdikannya kota administrasi dengan wilayah terluas di antara wilayah administratif lainnya di provinsi tersebut.

Berdasarkan pada Peta Rencana Pola Ruang Jakarta Timur 2.1 menggambarkan peruntukan dan pemanfaatan ruang wilayah Jakarta Timur berdasarkan RTRW DKI Jakarta. Peta tersebut menampilkan pembagian zona fungsi ruang seperti kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, serta jaringan prasarana dan sarana pendukung kota. Melalui peta ini dapat diketahui arah pengembangan wilayah, pola penggunaan lahan, serta keterkaitan antar fungsi ruang sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah Jakarta Timur. Skala wilayah tersebut menempatkan Jakarta Timur sebagai ruang penting dalam menopang aktivitas permukiman, ekonomi, serta pergerakan penduduk lintas kawasan di Jakarta.

Karakter fisik wilayah Jakarta Timur didominasi oleh dataran rendah dengan variasi ketinggian yang relatif terbatas. Meskipun pada beberapa bagian terdapat area dengan elevasi yang sedikit lebih tinggi, secara umum tinggi rata-rata wilayah berada pada kisaran 50 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi ini memengaruhi pola pengembangan kawasan, terutama dalam pemanfaatan ruang perkotaan, pembangunan permukiman, serta perencanaan infrastruktur dasar. Keberadaan sejumlah aliran sungai yang melintasi wilayah Jakarta Timur juga turut membentuk karakter ruang kota dan menuntut perencanaan tata ruang yang adaptif terhadap risiko lingkungan.



Gambar 2.2 Peta dan Batas Wilayah Jakarta Timur

(Sumber : Timur.Jakarta.go.id)

Secara administratif, wilayah Jakarta Timur terdiri atas sepuluh kecamatan, meliputi Pasar Rebo, Ciracas, Cipayang, Makasar, Kramat Jati, Jatinegara, Duren Sawit, Cakung, Pulo Gadung, dan Matraman. Kesepuluh kecamatan tersebut selanjutnya terbagi ke dalam 65 kelurahan yang tersebar secara relatif merata di seluruh wilayah Jakarta Timur.. Struktur administratif ini menjadi fondasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelaksanaan fungsi pelayanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga penyediaan infrastruktur perkotaan.

Luas wilayah yang signifikan dengan sebaran permukiman yang heterogen menjadikan Jakarta Timur memiliki tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah dan pelayanan publik. Jarak antarkawasan, kepadatan penduduk yang bervariasi, serta keterhubungan antarwilayah menuntut

sistem perencanaan yang mampu menjamin aksesibilitas dan pemerataan layanan. Kondisi geografis tersebut berimplikasi langsung pada kebutuhan pengembangan sistem transportasi publik dan infrastruktur pendukung yang mampu menjangkau kawasan permukiman hingga ke pusat-pusat aktivitas ekonomi dan layanan publik secara efektif dan berkelanjutan.

2.1.2 Kondisi Demografi Daerah Kota Jakarta Timur

Kecamatan Jakarta Timur	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jakarta Timur	
	2022	
Pasar Rebo		225.379
Ciracas		303.325
Cipayung		295.829
Makasar		210.004
Kramat Jati		301.271
Jatinegara		306.489
Duren Sawit		417.226
Cakung		565.764
Pulogadung		282.833
Matraman		175.763
Kota Jakarta Timur		3.083.883
Hasil Registrasi		-
Hasil Proyeksi ¹		-

Keterangan Data :

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur ¹Data dari Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 (Pertengahan tahun/Juni)

Gambar 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Jakarta Timur

(Sumber : BPS Jakarta Timur 2023)

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kecamatan di Kota Jakarta Timur tahun 2022, total penduduk Kota Jakarta Timur mencapai 3.083.883 jiwa. Jumlah penduduk tersebut tersebar di sepuluh kecamatan dengan komposisi yang beragam. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah Cakung dengan 565.764 jiwa, diikuti oleh Duren

Sawit sebanyak 417.226 jiwa. Tingginya jumlah penduduk di kedua kecamatan ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut merupakan kawasan hunian yang cukup padat dan berkembang pesat. Jatinegara dan Ciracas juga memiliki jumlah penduduk yang relatif besar, masing-masing sebesar 306.489 jiwa dan 303.325 jiwa.

Kecamatan Kramat Jati, Cipayung, dan Pulogadung memiliki jumlah penduduk pada kisaran menengah, yaitu antara 282.833 jiwa hingga 301.271 jiwa. Sementara itu, Pasar Rebo dan Makasar memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah dibandingkan kecamatan lainnya, dengan masing-masing 225.379 jiwa dan 210.004 jiwa. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit di Kota Jakarta Timur adalah Matraman, yaitu sebanyak 175.763 jiwa. Perbedaan jumlah penduduk antar kecamatan ini menunjukkan adanya variasi kepadatan penduduk yang dipengaruhi oleh luas wilayah, fungsi kawasan, serta perkembangan permukiman.

2.1.3 Visi dan Misi Daerah Kota Jakarta Timur



Gambar 2.4 Visi dan Misi Kota Jakarta Timur

(Sumber : Timur.Jakarta.go.id)

Kota Administrasi Jakarta Timur merumuskan visi pembangunan sebagai “Terwujudnya Kota Administrasi Jakarta Timur yang berorientasi pada pelayanan publik menuju kota berekonomi modern.” Rumusan visi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendorong perkembangan kota yang modern, berdaya saing, dan berorientasi pada kemajuan ekonomi.

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah daerah merumuskan sejumlah misi yang diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi yang akuntabel, pengembangan sistem penyediaan serta layanan informasi, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pelayanan informasi. Upaya lain yang dilakukan mencakup penerapan prinsip keterbukaan informasi melalui mekanisme pelayanan

yang cepat, tepat, mudah, dan sederhana. Secara keseluruhan, visi dan misi Kota Administrasi Jakarta Timur berfungsi sebagai landasan dalam perumusan dan pelaksanaan program serta kegiatan pemerintahan daerah, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

2.1.4 Mobilitas dan Transportasi Publik Jakarta Timur

Mobilitas penduduk di Kota Administrasi Jakarta Timur mencerminkan dinamika wilayah perkotaan dengan intensitas pergerakan yang tinggi. Aktivitas harian masyarakat, terutama untuk keperluan bekerja, pendidikan, dan kegiatan ekonomi, membentuk arus perjalanan yang bersifat rutin dan lintas wilayah. Sebagai kawasan dengan dominasi permukiman, Jakarta Timur berperan sebagai daerah asal pergerakan utama menuju pusat-pusat kegiatan di wilayah DKI Jakarta lainnya.

Kondisi spasial tersebut menimbulkan kebutuhan mobilitas yang besar dan berkelanjutan. Ketidakeimbangan antara lokasi tempat tinggal dan pusat aktivitas ekonomi mendorong ketergantungan masyarakat terhadap sistem transportasi publik. Dalam konteks ini, mobilitas tidak hanya berkaitan dengan pergerakan fisik, tetapi juga menentukan tingkat akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, layanan publik, dan kualitas kehidupan perkotaan.

Sistem transportasi publik di Jakarta Timur dilayani oleh berbagai moda, baik berbasis jalan maupun rel, yang menjadi bagian dari jaringan transportasi DKI Jakarta. Moda-moda tersebut meliputi TransJakarta sebagai angkutan bus utama, KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta angkutan pengumpan seperti Mikrotrans. Keberadaan transportasi publik berperan penting dalam melayani pergerakan masyarakat, terutama bagi kelompok yang tidak menggunakan kendaraan pribadi, sekaligus dalam upaya mengurangi beban lalu lintas jalan.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2024 jumlah perjalanan menggunakan angkutan umum di Jakarta mencapai sekitar 4,49 juta perjalanan per hari, dengan persentase penggunaan transportasi umum sebesar 22,19 persen dari total perjalanan harian. TransJakarta menjadi moda dengan jumlah pengguna terbesar, yaitu mencapai 371 juta penumpang sepanjang tahun 2024, sementara moda berbasis rel seperti MRT dan LRT melayani jutaan penumpang setiap bulannya. Data tersebut menunjukkan bahwa transportasi publik memiliki peran yang signifikan dalam mendukung mobilitas masyarakat perkotaan, termasuk di wilayah Jakarta Timur.

Tabel 2.1 Statistik Transportasi Umum di DKI Jakarta

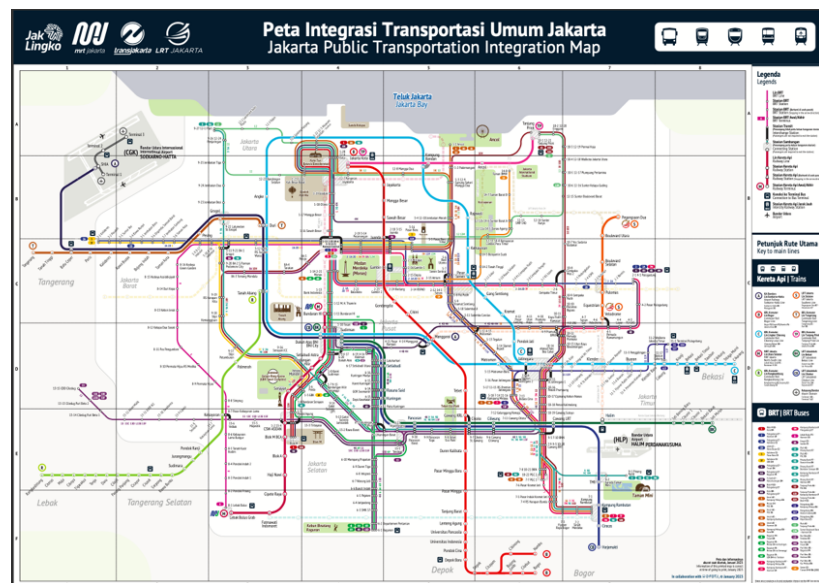
Moda Transportasi	Jumlah Penumpang / Perjalanan	Tahun	Sumber
Angkutan Umum (seluruh moda)	± 4,49 juta perjalanan per hari	2024	Pemprov DKI Jakarta
Persentase Penggunaan Angkutan Umum	22,19 %	2024	Pemprov DKI Jakarta
TransJakarta	371 juta penumpang per tahun	2024	Antaranews.com
MRT Jakarta	± 3,59 juta penumpang per bulan	2024	BPS DKI Jakarta
LRT Jakarta	-	2024	BPS DKI Jakarta
Mikrotrans	459.456	2024 - 2025	Dishub DKI Jakarta

Sumber: Pemprov DKI Jakarta (2024); BPS DKI Jakarta (2025); Antara (2025)

Mikrotrans memiliki posisi strategis dalam sistem mobilitas Jakarta Timur sebagai moda transportasi pengumpan yang melayani perjalanan jarak pendek di kawasan permukiman. Dengan rute yang menjangkau wilayah yang tidak terlayani angkutan besar, Mikrotrans berfungsi menghubungkan permukiman dengan simpul-simpul transportasi utama seperti halte TransJakarta dan stasiun kereta. Keberadaan Mikrotrans memperluas jangkauan layanan transportasi publik dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jaringan angkutan umum terpadu.

2.1.5 Kebijakan Sistem Integrasi Transportasi Publik Jakarta Timur

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen yang kuat dalam membangun sistem transportasi perkotaan yang terintegrasi. Upaya ini diarahkan untuk mendorong peralihan masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik, sehingga kepadatan lalu lintas dapat ditekan secara bertahap. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penguatan dan investasi berkelanjutan pada sektor transportasi publik merupakan langkah yang efektif dalam mengurangi tingkat kemacetan serta dampak negatifnya terhadap lingkungan perkotaan (Pavkova et al., 2015).



Gambar 2.5 Peta Integrasi Transportasi Umum Jakarta

(Sumber : Jak Lingko.co.id., 2024)

Berdasarkan pada peta rute diatas Sistem Mikrotrans Jak Lingko mengoperasikan lima koridor yang mencakup berbagai area urban dengan total 110 kilometer dan melayani di 210 halte. Fasilitas yang disediakan

mencakup pendingin udara (AC) di beberapa Kawasan tertentu dan kamera pengawas (CCTV) sebagai upaya peningkatan keamanan penumpang. Lebih lanjut, sistem ini dilengkapi dengan aplikasi seluler yang menyajikan informasi. Jak Lingko merupakan dengan aplikasi seluler yang menyajikan informasi. Jak Lingko merupakan komponen dari *Jakarta Integrated Transportation System (JITS)*.

Pengembangan sistem transportasi terintegrasi di Jakarta diawali dengan pembangunan moda transportasi massal berbasis rel, yaitu Moda Raya Terpadu (MRT). Seiring dengan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memperluas jaringan Bus Rapid Transit (BRT) serta melakukan peningkatan layanan Commuter Line di wilayah Jabodetabek sebagai bagian dari strategi integrasi transportasi. Langkah-langkah tersebut mencerminkan upaya sistematis dalam membangun jaringan angkutan umum yang saling terhubung dan mampu melayani kebutuhan mobilitas masyarakat secara lebih efisien.

Sebagai penguatan dari kebijakan tersebut, pemerintah meluncurkan program Jak Lingko yang berfokus pada integrasi sistem pembayaran dan layanan antarmoda transportasi publik di Jakarta. Program ini menghubungkan berbagai moda, seperti MRT, Lintas Raya Terpadu (LRT), Commuter Line Kereta Api Indonesia (KAI), serta Bus Transjakarta, dalam satu sistem layanan yang terpadu (Rachman et al., 2021). Melalui Jak

Lingko, masyarakat dapat melakukan perjalanan lintas moda dengan kemudahan akses dan tarif yang lebih terjangkau.

Dalam kerangka program Jak Lingko, dikembangkan pula layanan Mikrotrans Jak Lingko sebagai moda pengumpan yang menjangkau kawasan permukiman. Mikrotrans merupakan bentuk transformasi angkutan kota konvensional yang diintegrasikan ke dalam sistem Transjakarta, dengan tujuan memperluas jangkauan layanan transportasi publik dan meningkatkan konektivitas antara wilayah permukiman dengan simpul-simpul transportasi utama. Keberadaan Mikrotrans memperkuat fungsi transportasi publik sebagai sistem mobilitas yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan.

2.2 Gambaran Umum Jak Lingko



Gambar 2.6 Perbedaan Jak Lingko dan Mikrotrans

(Sumber : Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik 2023)

Jak Lingko dikembangkan sebagai kerangka sistem transportasi publik terpadu oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan tujuan memperbaiki mutu layanan angkutan umum sekaligus mendorong perubahan preferensi mobilitas masyarakat dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi publik. Sistem ini dirancang untuk mengonsolidasikan berbagai moda transportasi ke dalam satu kesatuan layanan, sehingga aktivitas perjalanan masyarakat dapat dilakukan secara lebih efisien, mudah dijangkau, dan berorientasi pada keberlanjutan (Jaklingko,2023)

Penerapan integrasi dalam sistem Jak Lingko mencakup sejumlah aspek utama, meliputi keterpaduan fisik, keterpaduan layanan, keterpaduan pengelolaan, serta keterpaduan sistem tarif dan pembayaran. Integrasi fisik diwujudkan melalui penghubungan antarsimpul transportasi seperti halte, stasiun, dan terminal guna mempermudah proses perpindahan antarmoda. Integrasi layanan diarahkan pada penyelarasan rute, jadwal operasional, serta standar pelayanan antarmoda, sehingga terbentuk jaringan transportasi publik yang saling melengkapi. Adapun integrasi manajerial berkaitan dengan koordinasi antaroperator dalam satu kerangka kebijakan transportasi publik yang terpadu. Sementara itu, integrasi sistem pembayaran memungkinkan pengguna melakukan perjalanan lintas moda dengan menggunakan satu mekanisme tarif dan alat pembayaran yang sama.

Cakupan layanan Jak Lingko meliputi berbagai moda transportasi publik yang beroperasi di wilayah Jakarta. Pada moda berbasis jalan, sistem ini mencakup layanan yang dikelola oleh PT Transjakarta, baik dalam bentuk Bus Rapid Transit (BRT) seperti Metrotrans dan Minitrans, maupun layanan non-BRT seperti Mikrotrans yang berfungsi sebagai angkutan pengumpan di kawasan permukiman. Selain itu, Jak Lingko juga mengintegrasikan moda berbasis rel, termasuk MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta layanan kereta komuter yang melayani wilayah Jakarta dan kawasan penyangganya (Transjakarta,2022). Keterpaduan berbagai moda tersebut membentuk jaringan transportasi publik yang lebih luas dan mampu menjangkau beragam kelompok masyarakat

Keberadaan sistem Jak Lingko diharapkan dapat meningkatkan tingkat aksesibilitas dan kenyamanan pengguna, sekaligus memperluas jangkauan layanan transportasi publik ke wilayah-wilayah yang sebelumnya belum terlayani secara optimal. Melalui sistem yang terintegrasi, masyarakat memperoleh alternatif moda yang saling terhubung dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Kondisi ini menjadi krusial mengingat Jakarta merupakan kawasan metropolitan dengan tingkat pergerakan penduduk yang tinggi serta persoalan transportasi yang kompleks.

Secara konseptual, istilah Jak Lingko merefleksikan filosofi dasar dari sistem transportasi terintegrasi tersebut. Kata “*Jak*” merujuk pada Jakarta sebagai wilayah pelayanan, sedangkan “*Lingko*” bermakna jejaring atau keterhubungan. Istilah *Lingko* diadopsi dari sistem pengelolaan lahan pertanian tradisional di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang menekankan prinsip keterpaduan dan keteraturan dalam pemanfaatan ruang. Nilai filosofis tersebut diadaptasi dalam pengembangan Jak Lingko sebagai simbol upaya membangun sistem transportasi publik yang terhubung, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dalam konteks kebijakan transportasi perkotaan DKI Jakarta, Jak Lingko mencerminkan pergeseran pendekatan dari pola sektoral menuju pendekatan sistemik, dengan menempatkan integrasi layanan dan kemudahan pengguna sebagai fokus utama dalam pengembangan mobilitas perkotaan yang berkelanjutan.

2.2.1 Visi dan Misi Jak Lingko

Sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan mentransformasi sistem transportasi publik di Jakarta, Jak Lingko memiliki landasan strategis yang tertuang dalam visi dan misi organisasi. Visi dan misi ini berfungsi sebagai pedoman operasional sekaligus arah kebijakan dalam mewujudkan integrasi antarmoda yang efektif, efisien, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat (Jaklingko,2023)

Visi

Menjadi entitas unggulan dalam menyediakan kemudahan layanan terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat melalui pengembangan inovasi teknologi pada sistem pembayaran yang terpadu dan berorientasi keberlanjutan.

Misi

1. Menyediakan sistem pembayaran serta layanan rekonsiliasi yang aman, efisien, berbasis digital, dan memiliki daya saing tinggi guna memenuhi kebutuhan pengguna layanan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital yang berwawasan global dengan tetap menjunjung nilai-nilai positif dan kearifan masyarakatn kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memberikan manfaat yang maksimal bagi operator transportasi serta masyarakat sebagai pengguna layanan secara berkelanjutan.

4. Mengembangkan sumber daya manusia di bidang digital yang berwawasan global dengan tetap menjunjung nilai-nilai positif dan kearifan masyarakat Indonesia.

2.2.2 Kelembagaan dan Aktor Pelaksana Kebijakan Jak Lingko

Tabel 2.2 Kelembagaan dan Kepemilikan Jak Lingko

Dimensi	Keterangan
Bentuk Badan Usaha	Perusahaan patungan (<i>joint venture</i>)
Dasar Hukum	Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 68 Tahun 2021
Tanggal Penetapan	15 Juli 2020
Pemegang Saham	PT MRT Jakarta (Perseroda)
	PT Transportasi Jakarta (Transjakarta)
	PT Jakarta Propertindo (Perseroda)
	Moda Integrasi Jakarta (MITJ)
Komposisi Kepemilikan Saham	PT MRT Jakarta 20%
	PT Transportasi Jakarta 20%
	PT Jakarta Propertindo: 20%
	Moda Integrasi Jakarta (MITJ): 40%
Keterangan MITJ	Perusahaan patungan antara PT MRT Jakarta dan PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Sumber: Pergub DKI Jakarta No. 68 Tahun 2021

Tabel 2.3 Ruang Lingkup Integrasi Sistem Jak Lingko

Dimensi Integrasi	Aktor Pelaksana
Integrasi Rute	Keterpaduan rute antar moda transportasi publik
Integrasi Manajemen	Koordinasi pengelolaan antar operator transportasi
Integrasi Pembayaran	Satu sistem pembayaran lintas moda dan layanan
Moda Transportasi Jalan	Transjakarta (Metrotrans, Minitrans), Mikrotrans

Moda Transportasi Rel	MRT Jakarta, LRT Jakarta, KRL Commuter Line, Kereta Bandara
Wilayah Layanan	DKI Jakarta dan wilayah Bodetabek
Mitra Pengelola Tol	Hutama Karya, Jasa Marga, Citra Marga Nusaphala Persada
Pengelola Sistem Pembayaran	PT Jak Lingko Indonesia

Sumber: PT Jak Lingko Indonesia; Nursita (2020)

2.2.3 Peran Layanan Armada Mikrotrans dalam Sistem Jak Lingko

Layanan mikrotrans memainkan peran penting sebagai penghubung kawasan yang tidak dijangkau moda transportasi massal seperti TransJakarta, KRL, atau MRT. Litman (2021) dalam *Evaluating Public Transit Benefits and Costs* menekankan bahwa moda angkutan skala kecil seperti mikrotrans dapat memperluas jangkauan layanan transportasi publik, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah. Keberadaan 2.968 unit armada mikrotrans dalam sistem Jak Lingko mencerminkan kebijakan transportasi yang diarahkan pada integrasi dan inklusivitas. Sistem ini mendukung prinsip *mobility as a service* (*MaaS*) yang menempatkan kemudahan akses, keterjangkauan, dan efisiensi sebagai elemen utama. Hensher et al. (2020) dalam *Transportation Research Part A* menilai pendekatan ini sebagai strategi kunci dalam pengembangan sistem transportasi perkotaan modern. Jumlah rute yang besar di Jakarta Timur mengindikasikan tingginya permintaan dan peran strategis mikrotrans dalam memenuhi kebutuhan mobilitas warga. Layanan

ini menjadi instrumen penting dalam mendukung pelayanan publik di bidang transportasi, sekaligus berkontribusi pada pemerataan akses, pengurangan kemacetan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat kota.

Tabel 2.4 Rute Mikrotrans Jakarta Timur

No	Kode Mikrotrans	Rute Perjalanan
1	JAK 02	Kampung Melayu – Duren Sawit
2	JAK 06	Kampung Rambutan – Pondok Gede
3	JAK 16	PGC – Condet
4	JAK 17	Senen – Pulogadung
5	JAK 19	Pinang Ranti – Kampung Rambutan
6	JAK 20	Cawang UKI – Lubang Buaya
7	JAK 21	PGC – Dwikora
8	JAK 22	Penas Kalimalang – Dwikora
9	JAK 25	Kalisari – Pasar Rebo
10	JAK 26	Rawamangun – Duren Sawit
11	JAK 27	Pulogebang – Rorotan
12	JAK 28	Taman Wiladatika – Pasar Rebo
13	JAK 33	Pulogadung – Kota
14	JAK 34	Rawamangun – Klender
15	JAK 35	Rawamangun – Pangkalan Jati
16	JAK 36	Cilangkap – Cililitan
17	JAK 37	Rute Cililitan – Condet via Kayu Manis
18	JAK 38	Bulak Ringin – Kampung Rambutan
19	JAK 39	Duren Sawit – Kalimalang
20	JAK 40	Pulogebang – Taman Harapan Baru

21	JAK 41	Kampung Melayu – Pulogadung
22	JAK 42	Kampung Melayu – Pondok Kelapa
23	JAK 71	Kampung Rambutan – Pinang Ranti
24	JAK 72	Kampung Rambutan – Pasar Rebo
25	JAK 73	Jambore Cibubur – Pasar Rebo
26	JAK 74	Rawamangun – Cipinang Muara
27	JAK 75	Kampung Pulo – Halim via Cililitan
28	JAK 84	Kampung Melayu – Kapin Raya
29	JAK 85	Bintara – Cipinang Indah
30	JAK 100	Terminal Pulo Gebang – Rusun Pinus Elok
31	JAK 105	Stasiun Tebet – Rusun Cipinang Muara
32	JAK 106	Terminal Klender – Terminal Kampung Melayu
33	JAK 112	Terminal Tanah Merah – Pulo Gadung

(Sumber : Diolah peneliti 2026)

Dari tabel informasi mengenai rute layanan armada Mikrotrans menjadi salah satu komponen penting dalam sistem transportasi terintegrasi Jak Lingko yang dirancang untuk memperkuat konektivitas antarmoda transportasi publik di DKI Jakarta. Mikrotrans berperan sebagai angkutan pengumpan yang melayani perjalanan jarak pendek di kawasan permukiman dan menghubungkannya dengan simpul-simpul transportasi utama, seperti halte Transjakarta, stasiun kereta, dan pusat aktivitas masyarakat. Keberadaan layanan ini bertujuan untuk memperluas jaringang sistem transportasi publik hingga ke wilayah yang tidak terlayani secara langsung oleh moda angkutan berkapasitas besar.

Selain berfungsi sebagai moda pengumpan, Mikrotrans juga berkontribusi dalam meningkatkan inklusivitas layanan transportasi publik. Armada Mikrotrans dirancang untuk melayani berbagai kelompok masyarakat, termasuk pekerja, pelajar, dan masyarakat menengah ke bawah, dengan tarif yang terjangkau dan sistem pembayaran yang terintegrasi. Integrasi Mikrotrans ke dalam sistem Jak Lingko memungkinkan pengguna untuk melakukan perjalanan lintas moda tanpa perlu menggunakan metode pembayaran yang berbeda, sehingga meningkatkan kenyamanan dan kepastian biaya perjalanan.

Dari sisi pengelolaan, Mikrotrans merupakan bentuk transformasi angkutan kota konvensional ke dalam sistem transportasi publik yang lebih terstruktur dan terstandarisasi. Pengintegrasian Mikrotrans di bawah koordinasi Transjakarta dan Jak Lingko mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan, keselamatan, serta kepastian operasional angkutan skala kecil. Pendekatan ini juga menjadi bagian dari strategi penataan transportasi perkotaan yang lebih tertib dan berorientasi pada kepentingan penggunaan.